



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 700/ 727 /TAHUN 2022

TENTANG
DAFTAR DAN PETA RISIKO KECURANGAN
PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perbaikan proses tata kelola pemerintahan dan pembangunan, manajemen risiko dan penguatan sistem pengendalian internal pemerintah, serta mengatasi kerentanan atas tindak kecurangan yang dilakukan pihak internal ataupun eksternal, perlu adanya daftar dan peta risiko kecurangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar dan Peta Risiko Kecurangan pada Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang

Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Daftar dan Peta Risiko Kecurangan pada Pemerintah Kabupaten Banyumas.
- KEDUA : Daftar Risiko Kecurangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Peta Risiko Kecurangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Daftar Risiko Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah suatu daftar pernyataan risiko kecurangan beserta kelengkapan atributnya yang terdiri dari pemilik risiko, dampak risiko, skor kemungkinan terjadinya risiko, skor dampak atas risiko, total skor risiko dan rencana tindak pengendalian atas risiko.
- KELIMA : Peta Risiko Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah suatu gambaran dari masing-masing risiko kecurangan secara visual sesuai dengan nilainya dalam matriks sehingga akan diperoleh informasi pada area mana risiko tersebut berada.
- KEENAM : Daftar dan Peta Risiko Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk:
- a. menjadi instrumen deteksi dini risiko kecurangan;
 - b. menjadi dasar untuk merencanakan pengendalian atas risiko secara terukur dan komprehensif;
 - c. menjadi sarana evaluasi kelemahan pengendalian dan mencari solusi kecurangan yang masih terjadi.
- KETUJUH : Daftar dan Peta Risiko Kecurangan disusun pada 11 (sebelas) area penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yaitu:
- a. perencanaan dan penganggaran;
 - b. pengawasan;
 - c. pengadaan barang/jasa;
 - d. manajemen aset daerah;
 - e. manajemen pegawai;
 - f. penyusunan laporan keuangan;
 - g. pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - h. optimalisasi pajak daerah;
 - i. penyaluran hibah dan bantuan social;
 - j. pelayanan kesehatan; dan
 - k. pelayanan pendidikan.
- KEDELAPAN : Daftar dan Peta Risiko Kecurangan disusun menggunakan skala 5 (lima) dalam analisis kemungkinan dan dampak, yaitu:
- a. skala kemungkinan:
 - 1) sangat jarang;

- 2) jarang;
 - 3) kadang-kadang;
 - 4) sering; dan
 - 5) sangat sering.
- b. skala dampak:
- 1) tidak signifikan;
 - 2) kurang signifikan;
 - 3) sedang;
 - 4) signifikan; dan
 - 5) sangat signifikan.

KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 10 NOV 2022

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 700/727/TAHUN 2022
TENTANG DAFTAR DAN PETA RISIKO KECURANGAN PADA
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DAFTAR RISIKO KECURANGAN
PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

No	Area	Pernyataan Risiko	Pemilik Risiko	Dampak	Skor Dampak	Skor Kemungkinan Terjadi	Total Skor	Rencana Tindak Pengendalian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Perencanaan dan Penganggaran	Benturan kepentingan dalam penetapan anggaran POKIR bagi anggota DPRD dengan tujuan untuk mendapatkan suara atau dukungan masyarakat meskipun tidak sesuai kebutuhan sesungguhnya	Bupati Banyumas	pembangunan daerah tidak tepat sasaran dan berpotensi tidak mendukung visi misi Bupati	5	3	15	Reviu RKPD oleh APIP dengan mencermati program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan anggaran dari POKIR, apakah benar-benar mendukung visi dan misi Bupati dan/atau kebutuhan masyarakat
		Terjadinya kolusi dan/atau suap-menyuap antara legislatif dan eksekutif agar dokumen perencanaan dibuat berdasarkan kemauan pihak tertentu tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat dan umum	Bupati Banyumas	anggaran tidak diprioritaskan kepada program dan kegiatan yang mendukung visi misi Bupati	5	3	15	Reviu RKPD oleh APIP dengan mencermati program dan kegiatan, apakah benar-benar mendukung visi dan misi Bupati dan/atau kebutuhan masyarakat

No	Area	Pernyataan Risiko	Pemilik Risiko	Dampak	Skor Dampak	Skor Kemungkinan Terjadi	Total Skor	Rencana Tindak Pengendalian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Terjadinya gratifikasi dari penyedia kepada PPK dalam penyusunan RAB sehingga menguntungkan pihak tertentu	Bupati Banyumas	barang/jasa yang dihasilkan tidak tepat kualitas sehingga dapat menimbulkan kerugian negara/daerah	5	3	15	Tahapan perencanaan dan penganggaran dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku serta Reviu RKA oleh APIP sesuai dengan pedoman yang berlaku
		Terjadinya suap-menyuap antara penyedia dengan PPK dalam menentukan spesifikasi dalam perencanaan barang/jasa sehingga menguntungkan pihak tertentu	Bupati Banyumas	barang/jasa yang dihasilkan tidak tepat kualitas sehingga dapat menimbulkan kerugian negara/daerah	5	3	15	Tahapan perencanaan dan penganggaran dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku serta Reviu RKA oleh APIP sesuai dengan pedoman yang berlaku
		Kolusi, nepotisme ataupun benturan kepentingan dalam penyusunan RKA dengan merencanakan belanja yang menguntungkan pihak tertentu	Bupati Banyumas	pembangunan daerah tidak tepat sasaran dan tidak merata	5	3	15	Tahapan perencanaan dan penganggaran dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku serta Reviu RKA oleh APIP sesuai dengan pedoman yang berlaku

No	Area	Pernyataan Risiko	Pemilik Risiko	Dampak	Skor Dampak	Skor Kemungkinan Terjadi	Total Skor	Rencana Tindak Pengendalian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Pemberian gratifikasi dari TAPD kepada DPRD ataupun sebaliknya dalam proses persetujuan perencanaan dan penganggaran	Bupati Banyumas	anggaran tidak diprioritaskan kepada program dan kegiatan yang mendukung visi misi Bupati	5	3	15	1. Optimalisasi peran UPG pada Sekretariat DPRD dan OPD terkait; 2. Internalisasi program pengendalian gratifikasi kepada anggota DPRD dan OPD terkait
2.	Pengawasan	Benturan kepentingan dalam proses perencanaan pengawasan sehingga perangkat daerah dan/atau desa yang memiliki risiko tinggi kecurangan tidak masuk dalam PKPT	Bupati Banyumas	tidak tercapainya birokrasi yang bersih dan akuntabel	5	4	20	internalisasi dan evaluasi benturan kepentingan secara berkala
		Pemberian gratifikasi oleh auditan kepada APIP sehingga pemeriksaan tidak berjalan sesuai pedoman yang berlaku	Bupati Banyumas	tidak tercapainya birokrasi yang bersih dan akuntabel	5	3	15	1. Internalisasi dan evaluasi gratifikasi serta penerapan kode etik APIP secara berkala; 2. Supervisi secara berjenjang.

No	Area	Pernyataan Risiko	Pemilik Risiko	Dampak	Skor Dampak	Skor Kemungkinan Terjadi	Total Skor	Rencana Tindak Pengendalian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Benturan kepentingan (hubungan kekeluargaan/pertemanan) antara APIP dan auditan sehingga pemeriksaan tidak berjalan sesuai pedoman yang berlaku	Bupati Banyumas	tidak tercapainya birokrasi yang bersih dan akuntabel	5	2	10	internalisasi dan evaluasi benturan kepentingan secara berkala
		Terjadinya suap-menyuap antara auditan dan APIP sehingga temuan kerugian negara/daerah tidak masuk dalam LHP	Bupati Banyumas	dapat menimbulkan kerugian negara/daerah	5	2	10	1. <i>management oversight</i> ; 2. evaluasi intern antar Inspektur pembantu; 3. telaah sejawat antar Inspektorat Daerah; 4. evaluasi penerapan kode etik
		Pemerasan oleh APIP kepada auditan untuk menghilangkan temuan kerugian negara	Bupati Banyumas	dapat menimbulkan kerugian negara/daerah	5	2	10	1. <i>management oversight</i> ; 2. evaluasi intern antar Inspektur pembantu; 3. telaah sejawat antar Inspektorat Daerah; 4. evaluasi penerapan kode etik
		Intervensi dari manajemen (Pemerintah Kabupaten Banyumas) agar APIP tidak mengungkap tindak pidana korupsi	Bupati Banyumas	dapat menimbulkan kerugian negara/daerah	5	2	10	1. <i>Whistle Blowing System</i> (WBS); 2. telaah sejawat antar Inspektorat Daerah

No	Area	Pernyataan Risiko	Pemilik Risiko	Dampak	Skor Dampak	Skor Kemungkinan Terjadi	Total Skor	Rencana Tindak Pengendalian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Kolusi antara APIP dan auditan untuk menghilangkan bukti audit	Bupati Banyumas	tidak tercapainya birokrasi yang bersih dan akuntabel	5	2	10	1. <i>management oversight</i> ; 2. evaluasi intern antar Inspektur pembantu; 3. telaah sejawat antar Inspektorat Daerah; 4. evaluasi penerapan kode etik
		Terjadinya suap-menyuap antara auditan dan APIP agar temuan kerugian negara/daerah dalam Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan (SIMHP) dinyatakan selesai	Bupati Banyumas	dapat menimbulkan kerugian negara/daerah	5	2	10	1. <i>management oversight</i> ; 2. evaluasi intern antar Inspektur pembantu; 3. telaah sejawat antar Inspektorat Daerah; 4. evaluasi penerapan kode etik
3.	Pengadaan Barang Jasa	Identifikasi kebutuhan barang/jasa yang ditetapkan Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak mencerminkan kebutuhan riil	Bupati Banyumas	pemborosan dan/atau kebocoran anggaran belanja pemerintah sehingga menimbulkan kerugian negara/daerah	5	4	20	1. Tahapan perencanaan dan penganggaran dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku; 2. Reviu RKA oleh APIP sesuai dengan pedoman yang berlaku; 3. <i>Probitiy Audit</i> oleh APIP.

No	Area	Pernyataan Risiko	Pemilik Risiko	Dampak	Skor Dampak	Skor Kemungkinan Terjadi	Total Skor	Rencana Tindak Pengendalian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		PA/KPA tidak mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) untuk menghilangkan persaingan karena telah memilih penyedia sejak tahap perencanaan	Bupati Banyumas	barang/jasa yang dihasilkan tidak tepat kualitas sehingga dapat menimbulkan kerugian negara/daerah	5	2	10	Evaluasi berkala oleh Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas
		Benturan kepentingan antara PPK dengan penyedia sehingga spesifikasi disusun mengarah kepada suatu merek atau penyedia tertentu	Bupati Banyumas	barang/jasa yang dihasilkan tidak tepat kualitas sehingga dapat menimbulkan kerugian negara/daerah	5	3	15	1. Internalisasi dan evaluasi benturan kepentingan di seluruh OPD; 2. Pengawasan oleh APIP (Reviu RKA)
		Suap-menyuap antara penyedia dengan PPK untuk menggelembungkan HPS sehingga nilai kontrak lebih tinggi	Bupati Banyumas	barang/jasa yang dihasilkan tidak tepat kualitas sehingga dapat menimbulkan kerugian negara/daerah	5	3	15	Reviu HPS oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) atau APIP

No	Area	Pernyataan Risiko	Pemilik Risiko	Dampak	Skor Dampak	Skor Kemungkinan Terjadi	Total Skor	Rencana Tindak Pengendalian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Persekongkolan antar sesama penyedia dalam mengatur harga penawaran pada proyek yang ditender oleh Pemerintah Kabupaten untuk memenangkan salah satu penyedia tertentu	Bupati Banyumas	barang/jasa yang dihasilkan tidak tepat kualitas sehingga dapat menimbulkan kerugian negara/daerah	5	3	15	1. <i>Probity audit</i> oleh APIP; 2. <i>Audit Information Technology</i> Pengadaan Barang/Jasa; 3. Penandatanganan Pakta Integritas oleh penyedia.
		Intervensi oleh manajemen atau Pemerintah Kabupaten kepada Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan untuk memenangkan penyedia tertentu meskipun tidak memenuhi kualifikasi teknis dan/atau penawaran terbaik	Bupati Banyumas	barang/jasa yang dihasilkan tidak tepat kualitas sehingga dapat menimbulkan kerugian negara/daerah	5	3	15	<i>Probity audit</i> oleh APIP
		Kolusi antara PPK, Penyedia, dan Konsultan Pengawas untuk memanipulasi data persentase penyelesaian pekerjaan	Bupati Banyumas	barang/jasa yang dihasilkan tidak tepat kualitas sehingga dapat menimbulkan kerugian negara/daerah	5	4	20	<i>Probity audit</i> oleh APIP

No	Area	Pernyataan Risiko	Pemilik Risiko	Dampak	Skor Dampak	Skor Kemungkinan Terjadi	Total Skor	Rencana Tindak Pengendalian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Kolusi antara PPK, Penyedia, Konsultan Pengawas dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk memanipulasi data tentang mutu hasil pekerjaan konstruksi	Bupati Banyumas	barang/jasa yang dihasilkan tidak tepat kualitas sehingga dapat menimbulkan kerugian negara/daerah	5	4	20	<i>Probit audit oleh APIP</i>
		Intervensi manajemen kepada PPK sehingga tidak melakukan pemutusan kontrak meskipun terjadi kondisi yang memenuhi syarat untuk dilakukannya pemutusan kontrak	Bupati Banyumas	Kerugian negara/daerah dari denda dan uang jaminan karena pemutusan kontrak pekerjaan	5	4	20	<i>Probit audit oleh APIP</i>
4.	Manajemen Aparatur Sipil Negara	Suap-menyuap dan/atau Benturan kepentingan dalam rekrutmen pegawai Non Aparatur Sipil Negara sehingga sumber daya manusia yang diperoleh tidak sesuai kebutuhan dan kualifikasi	Bupati Banyumas	Menurunnya kualitas Non Aparatur Sipil Negara dan reputasi pemerintah daerah buruk	5	4	20	1. Melakukan diseminasi terkait dengan penerimaan pegawai yang tidak dipungut biaya (gratis); 2. Evaluasi benturan kepentingan di seluruh OPD

No	Area	Pernyataan Risiko	Pemilik Risiko	Dampak	Skor Dampak	Skor Kemungkinan Terjadi	Total Skor	Rencana Tindak Pengendalian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Kolusi, nepotisme ataupun benturan kepentingan dalam proses mutasi dan promosi pegawai sehingga proses tersebut tidak mempertimbangkan kompetensi jabatan dan pola mutasi yang ditetapkan	Bupati Banyumas	Menurunnya efisiensi dan efektivitas kerja perangkat daerah	5	4	20	1. APIP melakukan reviu atas pola rotasi, promosi dan mutasi Aparatur Sipil Negara; 2. Melakukan evaluasi jabatan
		Suap-menyuap dalam proses mutasi dan promosi pegawai sehingga proses tersebut tidak mempertimbangkan kompetensi jabatan dan pola mutasi yang ditetapkan	Bupati Banyumas	Merusak kebijakan pola mutasi yang telah disusun	5	1	5	1. APIP melakukan reviu atas pola rotasi, promosi dan mutasi Aparatur Sipil Negara; 2. Melakukan evaluasi jabatan
		Terjadinya gratifikasi dalam proses mutasi dan promosi pegawai sehingga proses tersebut tidak mempertimbangkan kompetensi jabatan dan pola mutasi yang ditetapkan	Bupati Banyumas	Jabatan yang diisi tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki	5	4	20	1. APIP melakukan reviu atas pola rotasi, promosi dan mutasi Aparatur Sipil Negara; 2. Melakukan evaluasi jabatan; 3. Optimalisasi peran UPG.

No	Area	Pernyataan Risiko	Pemilik Risiko	Dampak	Skor Dampak	Skor Kemungkinan Terjadi	Total Skor	Rencana Tindak Pengendalian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Terjadinya gratifikasi dalam pemrosesan berkas dokumen kepegawaian dengan harapan dapat menguntungkan pegawai yang bersangkutan	Bupati Banyumas	Menghambat proses berkas dokumen kepegawaian lainnya	5	4	20	1. Optimalisasi peran UPG; 2. Optimalisasi penggunaan sistem informasi dalam pemrosesan dokumen kepegawaian
		Benturan kepentingan pada saat pengukuran kinerja pegawai sehingga pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tidak berdasarkan kinerja yang sebenarnya	Bupati Banyumas	Timbul kesenjangan sosial antar pegawai	5	5	25	Evaluasi hasil pengukuran kinerja secara berkala baik secara terpusat oleh Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) maupun secara internal oleh OPD
		Kolusi dan nepotisme dalam penjatuhan hukuman disiplin sehingga hukuman yang diberikan tidak sesuai dengan sanksi yang seharusnya diberikan	Bupati Banyumas	Produktivitas kerja pegawai menurun	5	3	15	Audit manajemen Aparatur Sipil Negara oleh APIP

No	Area	Pernyataan Risiko	Pemilik Risiko	Dampak	Skor Dampak	Skor Kemungkinan Terjadi	Total Skor	Rencana Tindak Pengendalian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.	Manajemen Aset Daerah	Kecurangan dalam penyusunan RKBMD sehingga menguntungkan pihak tertentu	Bupati Banyumas	Pemborosan dan dapat menimbulkan kerugian negara/daerah	5	4	20	1. Optimalisasi pengendalian dalam penyusunan RKBMD oleh Bidang Aset pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kab. Banyumas; 2. APIP lebih mencermati RKBMD pada saat reviu RKA, apakah RKA yang disusun telah sesuai dengan RKBMD resmi yang ditandatangani oleh Kepala OPD dan disampaikan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Banyumas.
		Terjadinya suap-menyuap, gratifikasi dan/atau benturan kepentingan dalam proses pengadaan BMD sehingga barang yang diperoleh tidak sesuai kualitas yang direncanakan	Bupati Banyumas	Timbulnya kerugian negara/daerah	5	4	20	1. Penandatanganan pakta integritas dalam proses pengadaan barang/jasa; 2. Optimalisasi peran UPG dalam internalisasi pengendalian gratifikasi; 3. Sosialisasi benturan kepentingan; <i>Probity audit</i> oleh APIP.

No	Area	Pernyataan Risiko	Pemilik Risiko	Dampak	Skor Dampak	Skor Kemungkinan Terjadi	Total Skor	Rencana Tindak Pengendalian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Terjadinya suap-menyuap dan/atau gratifikasi dalam proses pengamanan aset secara administrasi, hukum maupun fisik sehingga menguntungkan pihak tertentu	Bupati Banyumas	Kehilangan BMD yang menyebabkan kerugian negara/daerah	5	2	10	1. Sertifikasi tanah milik Pemerintah Daerah; 2. Apel BMD secara berkala; 3. Inventarisasi BMD secara berkala untuk memastikan jumlah dan nilai aset; 4. Pemberian papan nama dan/atau label BMD; 5. Reviu tata kelola BMD oleh APIP.
		Penyalahgunaan BMD untuk kepentingan pribadi	Bupati Banyumas	Kegiatan operasional terhambat	5	5	25	1. Penandatanganan pakta integritas terkait penggunaan BMD; 2. Pemberian label BMD.
		Penggelapan BMD dengan menyatakan bahwa BMD rusak/hilang dengan tujuan agar BMD tersebut dapat dimiliki secara pribadi	Bupati Banyumas	Kehilangan aset	5	3	15	1. Pengamanan aset secara fisik, administrasi dan hukum; 2. Reviu tata kelola BMD oleh APIP.
		Kolusi dalam lelang BMD yang dihapus sehingga pemenang lelang bukan penawar tertinggi/terbaik	Bupati Banyumas	Nilai penerimaan atas hasil lelang penghapusan BMD tidak optimal	5	4	20	Reviu tata kelola BMD oleh APIP

No	Area	Pernyataan Risiko	Pemilik Risiko	Dampak	Skor Dampak	Skor Kemungkinan Terjadi	Total Skor	Rencana Tindak Pengendalian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Benturan kepentingan dalam penyajian aset pada LKPD sehingga data BMD tidak akurat	Bupati Banyumas	Informasi aset daerah pada LKPD tidak akurat	5	1	5	1. Rekonsiliasi aset secara berkala; 2. Reviu tata kelola BMD oleh APIP; 3. APIP lebih mencermati nilai aset daerah yang disajikan dalam pelaksanaan reviu LKPD.
6.	Penyusunan Laporan Keuangan	Terjadinya benturan kepentingan dalam penyusunan laporan keuangan sehingga penyajian nilai aset, kewajiban dan ekuitas tidak sesuai kondisi yang sebenarnya	Bupati Banyumas	Laporan keuangan menyajikan data yang tidak akurat dan andal serta dapat menyesatkan dalam pengambilan keputusan	5	2	10	1. Reviu LKPD oleh APIP; 2. Rekonsiliasi aset dan keuangan.
		Terjadinya benturan kepentingan sehingga pendapatan dan/atau belanja tidak dicatat pada akun, nilai dan/atau periode yang tepat sehingga menguntungkan pihak tertentu	Bupati Banyumas	Laporan keuangan menyajikan data yang tidak akurat dan andal serta dapat menyesatkan dalam pengambilan keputusan	5	4	20	1. Reviu LKPD oleh APIP; 2. Rekonsiliasi aset dan keuangan.

No	Area	Pernyataan Risiko	Pemilik Risiko	Dampak	Skor Dampak	Skor Kemungkinan Terjadi	Total Skor	Rencana Tindak Pengendalian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Terjadinya benturan kepentingan dalam reviu LKPD sehingga reviu laporan keuangan tidak dilakukan sesuai standar dan menguntungkan pihak tertentu	Bupati Banyumas	Laporan keuangan menyajikan data yang tidak akurat dan andal serta dapat menyesatkan dalam pengambilan keputusan	5	1	5	1. Reviu berjenjang; 2. <i>Management Oversight</i> kepada APIP.
		Terjadinya suap menyuap yang dilakukan pejabat pemerintahan daerah demi mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Bupati Banyumas	Laporan keuangan menyajikan data yang tidak akurat dan andal serta dapat menyesatkan dalam pengambilan keputusan	5	1	5	Optimalisasi peran UPG Kabupaten Banyumas
7.	Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan	Kolusi dan benturan kepentingan dalam proses penyusunan kebijakan/regulasi perijinan sehingga menguntungkan pihak tertentu	Bupati Banyumas	1. Tidak maksimalnya potensi pendapatan daerah yang dapat menyebabkan kerugian Daerah/Negara; 2. Penyelenggaraan perizinan tidak sesuai dengan penataan ruang	5	2	10	Reviu kebijakan perizinan oleh Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah (PPUPD)

No	Area	Pernyataan Risiko	Pemilik Risiko	Dampak	Skor Dampak	Skor Kemungkinan Terjadi	Total Skor	Rencana Tindak Pengendalian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Pemberian gratifikasi dari pemohon kepada petugas perijinan sehingga proses perijinannya lebih diutamakan dan dipercepat tanpa mempertimbangkan SOP	Bupati Banyumas	merugikan pemohon yang lain dan menurunnya reputasi pelayanan perizinan pada Pemerintah Kabupaten Banyumas	5	4	20	Optimalisasi peran UPG pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam rangka internalisasi dan pelaporan gratifikasi
		Pungutan liar yang dilakukan petugas perijinan sehingga membuat proses perijinan berbiaya tinggi	Bupati Banyumas	perizinan tidak tepat waktu apabila pemohon tidak memberikan uang seperti yang diminta oleh pelaku pungli, serta menurunnya reputasi pelayanan perizinan pada Pemerintah Kabupaten Banyumas	5	2	10	Optimalisasi peran Tim Saber Pungli dalam rangka sosialisasi dan pelaporan pungutan liar

No	Area	Pernyataan Risiko	Pemilik Risiko	Dampak	Skor Dampak	Skor Kemungkinan Terjadi	Total Skor	Rencana Tindak Pengendalian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Suap-menyuap antara pemohon dan tim teknis dalam proses verifikasi perijinan agar rekomendasi teknis diberikan meskipun tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.	Bupati Banyumas	Data perijinan tidak benar dan akurat; Menurunnya reputasi pelayanan perizinan pada Pemerintah Kabupaten Banyumas serta berpotensi menimbulkan kerugian negara/daerah	5	3	15	1. Optimalisasi SPIP pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan seluruh dinas teknis terkait; 2. Reviu tata kelola perizinan oleh APIP.
		Manipulasi data Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) oleh petugas pendapatan sehingga keputusan pemberian izin tetap diterbitkan meskipun pemohon memiliki tanggungan pajak yang belum dilunasi	Bupati Banyumas	menimbulkan kerugian daerah	5	4	20	1. Penggunaan dan optimalisasi aplikasi perizinan secara menyeluruh; 2. internalisasi budaya pelayanan prima

No	Area	Pernyataan Risiko	Pemilik Risiko	Dampak	Skor Dampak	Skor Kemungkinan Terjadi	Total Skor	Rencana Tindak Pengendalian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8.	Optimalisasi Pajak Daerah	Benturan kepentingan (hubungan kekeluargaan/pertemanan) antara pegawai yang bertugas mendata dengan wajib pajak dalam penentuan basis data pajak daerah yang tidak sesuai pedoman sehingga wajib pajak tidak masuk dalam basis data	Bupati Banyumas	hilangnya potensi pendapatan daerah dari sektor pajak	5	4	20	monitoring dan evaluasi basis data pajak daerah oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Banyumas
		Benturan kepentingan antara petugas dengan pemilik objek pajak dalam menentukan potensi pajak daerah, sehingga terdapat objek-objek yang tidak dikenai pajak	Bupati Banyumas	hilangnya potensi pendapatan daerah dari sektor pajak	5	4	20	1. monitoring dan evaluasi basis data pajak daerah; 2. reviu tata kelola pajak daerah oleh APIP

No	Area	Pernyataan Risiko	Pemilik Risiko	Dampak	Skor Dampak	Skor Kemungkinan Terjadi	Total Skor	Rencana Tindak Pengendalian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Pemberian gratifikasi terhadap petugas pajak yang melakukan perhitungan menggunakan <i>Official Assessment system</i> , sehingga pajak tertagih ke wajib pajak tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya	Bupati Banyumas	Pajak tertagih ke wajib pajak tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya	5	3	15	1. Optimalisasi peran UPG pada Bapenda dalam rangka internalisasi dan pelaporan gratifikasi; 2. reviu tata kelola pajak daerah oleh APIP
		Penggelapan pajak oleh wajib pajak dalam <i>self assesment system</i> dengan melaporkan data pendapatan yang tidak sesuai dengan keadaan riil atau manipulasi data sehingga kewajiban pajak wajib pajak tersebut berkurang	Bupati Banyumas	hilangnya potensi pendapatan daerah dari sektor pajak	5	4	20	1. Menggencarkan sosialisasi terkait peraturan pajak dan melakukan pengecekan secara periodik terkait kesesuaian pembayaran pajak dengan kondisi sebenarnya; 2. Pemasangan alat monitoring pajak pada tempat usaha sebagai obyek pajak; 3. reviu tata kelola pajak daerah oleh APIP

No	Area	Pernyataan Risiko	Pemilik Risiko	Dampak	Skor Dampak	Skor Kemungkinan Terjadi	Total Skor	Rencana Tindak Pengendalian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Suap-menyuap antara petugas berwenang dengan wajib pajak terkait verifikasi penghitungan besaran pajak yang harus dibayarkan sehingga pembayaran pajak tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku	Bupati Banyumas	hilangnya potensi pendapatan daerah dari sektor pajak	5	4	20	reviu tata kelola pajak daerah oleh APIP
		Pemberian gratifikasi pada petugas pajak pada saat penagihan tunggakan pajak sehingga tunggakan pajak tidak tertagih secara maksimal	Bupati Banyumas	kerugian negara/daerah dari sektor pajak	5	4	20	1. Optimalisasi peran UPG pada Bapenda dalam rangka internalisasi dan pelaporan gratifikasi; 2. reviu tata kelola pajak daerah oleh APIP
		Benturan kepentingan sehingga tempat usaha wajib pajak tidak dipasang alat monitoring pajak	Bupati Banyumas	hilangnya potensi pendapatan daerah dari sektor pajak	5	4	20	Sosialisasi dan pelaporan benturan kepentingan

No	Area	Pernyataan Risiko	Pemilik Risiko	Dampak	Skor Dampak	Skor Kemungkinan Terjadi	Total Skor	Rencana Tindak Pengendalian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Manipulasi data pendapatan pajak sehingga insentif pungutan pajak yang didapatkan menjadi lebih besar	Bupati Banyumas	berkurangnya pendapatan daerah dari sektor pajak karena digunakan untuk membayar insentif yang lebih tinggi dari seharusnya	5	3	15	reviu tata kelola pajak daerah oleh APIP
9.	Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial	Benturan kepentingan (hubungan kekeluargaan/pertemanan) antara pegawai yang bertugas mendata dengan penerima dalam penentuan basis data penerima bantuan sosial sehingga tidak tepat sasaran dan penerima yang tumpang tindih	Bupati Banyumas	Pemberian bantuan sosial tidak tepat sasaran serta pemberian bantuan sosial ganda yang merugikan negara/daerah	5	4	20	1. Monitoring dan evaluasi oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsospermasdes) terhadap data penerima bantuan sosial; 2. Sosialisasi benturan kepentingan.
		Benturan kepentingan dalam penentuan agen penyalur bantuan pangan non tunai (BPNT), sehingga terpilihnya agen penyalur yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku	Bupati Banyumas	Terpilihnya agen penyalur yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku	5	4	20	Monitoring dan evaluasi oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsospermasdes) terhadap proses penetapan agen penyalur

No	Area	Pernyataan Risiko	Pemilik Risiko	Dampak	Skor Dampak	Skor Kemungkinan Terjadi	Total Skor	Rencana Tindak Pengendalian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Gratifikasi dan/atau benturan kepentingan antara pihak dari dinas terkait dengan penyedia sehingga e-warong harus membeli sembako BPNT dari penyedia tersebut	Bupati Banyumas	sembako BPNT terlalu mahal dan tidak tepat kualitas	5	4	20	1. Optimalisasi peran UPG dalam sosialisasi gratifikasi; 2. Sosialisasi benturan kepentingan; 3. Optimalisasi SPIP pada dinas terkait
		Terjadi kecurangan e-warong dan penyedia sehingga BPNT yang disalurkan tidak sesuai dengan kualitas yang ditetapkan sehingga menguntungkan pihak-pihak tertentu	Bupati Banyumas	menurunkan reputasi pemerintah pusat/daerah/desa, serta BPNT yang terlalu mahal dan tidak tepat kualitas	5	3	15	Monitoring dan evaluasi penyaluran BPNT oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsospermasdes)
		Penggelapan oleh petugas penyalur bantuan sosial dengan memotong besaran bantuan sosial sehingga jumlah bantuan sosial tidak sesuai nilai yang seharusnya	Bupati Banyumas	menurunkan reputasi pemerintah pusat/daerah/desa serta dapat menimbulkan kerugian negara/daerah	5	3	15	Monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan sosial oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsospermasdes)

No	Area	Pernyataan Risiko	Pemilik Risiko	Dampak	Skor Dampak	Skor Kemungkinan Terjadi	Total Skor	Rencana Tindak Pengendalian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Gratifikasi dan/atau benturan kepentingan antara pihak dari dinas terkait dengan pengusul proposal sehingga usulan hibah diloloskan meskipun tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Bupati Banyumas	penyaluran hibah tidak tepat sasaran dan dapat menimbulkan kerugian negara/daerah	5	3	15	Monitoring dan evaluasi proses pengusulan dan pemberian hibah oleh perangkat daerah terkait
		Pemberian bantuan sosial/hibah dikaitkan dengan kepentingan politik oknum tertentu sehingga elektabilitas oknum tersebut meningkat di daerah yang bersangkutan	Bupati Banyumas	penyaluran hibah tidak tepat sasaran dan dapat menimbulkan kerugian negara/daerah	5	4	20	Monitoring dan evaluasi proses pengusulan dan pemberian hibah oleh perangkat daerah terkait
10.	Pelayanan Kesehatan	Pemberian gratifikasi (komisi obat dan alat kesehatan) oleh penyedia obat dan alat kesehatan kepada dokter sehingga dokter menggunakan penyedia tersebut tanpa mempertimbangkan harga dan kualitas	Bupati Banyumas	menurunnya derajat kesehatan masyarakat serta dapat menimbulkan kerugian negara/daerah	5	4	20	1. Internalisasi dan evaluasi gratifikasi pada Dinas Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 2. Optimalisasi SPIP di lingkungan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah; 3. Pengawasan oleh APIP melalui audit, reviu dan pengawasan lainnya.

No	Area	Pernyataan Risiko	Pemilik Risiko	Dampak	Skor Dampak	Skor Kemungkinan Terjadi	Total Skor	Rencana Tindak Pengendalian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Penggelapan obat dan/atau alat kesehatan tenaga kesehatan untuk digunakan dalam praktek pribadi	Bupati Banyumas	menurunnya derajat kesehatan masyarakat serta dapat menimbulkan kerugian negara/daerah	5	3	15	1. Pendidikan <i>anti-fraud</i> ; 2. Optimalisasi SPIP di lingkungan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah; 3. Optimalisasi Sistem Informasi Manajemen (SIMRS) untuk persediaan; 4. Pengawasan oleh APIP melalui audit, reviu dan pengawasan lainnya.
		Kolusi antara pengurus barang dengan tenaga kesehatan untuk memanipulasi data persediaan obat-obatan	Bupati Banyumas	menurunnya derajat kesehatan masyarakat serta dapat menimbulkan kerugian negara/daerah	5	3	15	1. Pendidikan <i>anti-fraud</i> ; 2. Optimalisasi SPIP di lingkungan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah; 3. Optimalisasi Sistem Informasi Manajemen (SIMRS) untuk persediaan; 4. Pengawasan oleh APIP melalui audit, reviu dan pengawasan lainnya.
		Gratifikasi oleh pasien kepada tenaga kesehatan agar mendapatkan perlakuan khusus yang tidak sesuai SOP	Bupati Banyumas	Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat dan reputasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan	5	4	20	Optimalisasi peran UPG Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah

No	Area	Pernyataan Risiko	Pemilik Risiko	Dampak	Skor Dampak	Skor Kemungkinan Terjadi	Total Skor	Rencana Tindak Pengendalian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Perbuatan curang oleh tenaga kesehatan dalam membuat dokumen tagihan untuk menagih biaya pelayanan medis yang tidak dilakukan/ tidak dibutuhkan	Bupati Banyumas	1. menurunnya derajat kesehatan masyarakat; 2. menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat dan reputasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan.	5	4	20	1. Optimalisasi SPIP di lingkungan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah; 2. Pengawasan oleh APIP melalui audit, reviu dan pengawasan lainnya.
		Manipulasi data kesehatan pada saat pengusulan anggaran dan/atau pelaporan kinerja	Bupati Banyumas	menurunnya derajat kesehatan masyarakat serta dapat menimbulkan kerugian negara/daerah	5	3	15	Verifikasi pengusulan anggaran oleh TAPD yang didasarkan pada data yang akurat
		Pemanfaatan jabatan oleh tenaga kesehatan yang memiliki Fasilitas Pelayanan Kesehatan, yaitu memindahkan pasien Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah tempatnya bekerja ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan pribadinya	Bupati Banyumas	menurunnya derajat kesehatan masyarakat serta dapat menimbulkan kerugian negara/daerah	5	4	20	1. Pendidikan <i>anti-fraud</i> ; 2. Optimalisasi SPIP di lingkungan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah.

No	Area	Pernyataan Risiko	Pemilik Risiko	Dampak	Skor Dampak	Skor Kemungkinan Terjadi	Total Skor	Rencana Tindak Pengendalian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11.	Pelayanan pendidikan	Pemberian gratifikasi oleh calon peserta didik kepada manajemen pendidikan untuk memperoleh kuota tempat duduk dalam proses penerimaan peserta didik baru	Bupati Banyumas	Menutup kesempatan siswa yang lebih berhak mengisi kuota pada satuan pendidikan tertentu	5	4	20	1. Mengintensifkan sosialisasi dan diseminasi terkait dengan gratifikasi di tempat-tempat layanan; 2. Optimalisasi peran UPG pada Dinas Pendidikan
		Benturan kepentingan antara pejabat dengan calon peserta didik agar calon peserta didik dapat diterima di satuan pendidikan tertentu	Bupati Banyumas	Menutup kesempatan siswa yang lebih berhak mengisi kuota pada satuan pendidikan tertentu	5	4	20	Mengintensifkan sosialisasi dan diseminasi terkait dengan benturan kepentingan di satuan pendidikan
		Intervensi dari pihak-pihak tertentu dalam proses PPDB	Bupati Banyumas	Menutup kesempatan siswa yang lebih berhak mengisi kuota pada satuan pendidikan tertentu	5	4	20	PPDB sepenuhnya dilaksanakan melalui sistem online sesuai ketentuan yang berlaku sehingga dapat berjalan secara obyektif, transparan dan akuntabel

No	Area	Pernyataan Risiko	Pemilik Risiko	Dampak	Skor Dampak	Skor Kemungkinan Terjadi	Total Skor	Rencana Tindak Pengendalian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Adanya pungutan liar oleh manajemen pendidikan dengan modus sumbangan pendidikan	Bupati Banyumas	Peserta didik dirugikan karena biaya pendidikan yang tinggi serta menguntungkan manajemen pendidikan yang melakukan pungutan liar	5	4	20	Optimalisasi peran tim Saber Pungli
		Gratifikasi dari penyedia sarana dan prasarana pendidikan kepada manajemen pendidikan untuk dapat ditunjuk sebagai penyedia	Bupati Banyumas	Sarana dan prasarana pendidikan tidak tepat kualitas serta dapat menurunkan mutu pendidikan	5	4	20	1. Optimalisasi penerapan Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah); 2. Optimalisasi pengawasan oleh APIP melalui audit, reviu dan lainnya.
		Terjadinya kecurangan dalam penyajian data terkait dengan tunjangan profesi guru	Bupati Banyumas	Data yang disajikan tidak valid sehingga menimbulkan kerugian negara	5	4	20	Verifikasi secara lebih cermat oleh Dinas Pendidikan terhadap data usulan tunjangan profesi guru.

No	Area	Pernyataan Risiko	Pemilik Risiko	Dampak	Skor Dampak	Skor Kemungkinan Terjadi	Total Skor	Rencana Tindak Pengendalian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Kolusi, nepotisme dan benturan kepentingan dalam pemenuhan tenaga pendidikan Non-Aparatur Sipil Negara dengan menyusun syarat kompetensi yang menguntungkan saudara/teman/kolega	Bupati Banyumas	Ketidakpercayaan masyarakat terhadap birokrasi serta dapat kualitas tenaga pendidikan yang diperoleh tidak sesuai kebutuhan	5	4	20	1. Verifikasi secara berjenjang terhadap data kebutuhan tenaga pendidik pada sistem data pokok pendidikan; 2. Optimalisasi penggunaan sistem data pokok pendidikan yang telah akurat dalam pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik.

Keterangan:

- | | | | | | |
|---------|---|--|-----------|---|---|
| 1. APIP | : | Aparat Pengawasan Intern Pemerintah | 10. LHP | : | Laporan Hasil Pemeriksaan |
| 2. RKPD | : | Rencana Kerja Pemerintah Daerah | 11. HPS | : | Harga Perkiraan Sendiri |
| 3. APBD | : | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah | 12. BMD | : | Barang Milik Daerah |
| 4. RKA | : | Rencana Kerja Anggaran | 13. RKBMD | : | Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah |
| 5. RAB | : | Rencana Anggaran Belanja | 14. LKPD | : | Laporan Keuangan Pemerintah Daerah |
| 6. PPK | : | Pejabat Pembuat Komitmen | 15. SOP | : | Standar Operasional Prosedur |
| 7. TAPD | : | Tim Anggaran Pemerintah Daerah | 16. BPNT | : | Bantuan Pangan Non Tunai |
| 8. OPD | : | Organisasi Perangkat Daerah | 17. SPIP | : | Sistem Pengendalian Internal Pemerintah |
| 9. UPG | : | Unit Pengendalian Gratifikasi | 18. PPDB | : | Penerimaan Peserta Didik Baru |

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 700/727/TAHUN 2022
TENTANG DAFTAR DAN PETA RISIKO KECURANGAN PADA
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DAFTAR RISIKO KECURANGAN
PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

1. Area Perencanaan dan Penganggaran

Skala	Kemungkinan	Dampak				
		Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Sedang	Signifikan	Sangat Signifikan
5	Sangat Sering					
4	Sering					
3	Kadang - kadang					1. Benturan kepentingan dalam penetapan anggaran pokok-pokok pikiran (POKIR) bagi anggota DPRD dengan tujuan untuk mendapatkan suara atau dukungan masyarakat meskipun tidak sesuai kebutuhan sesungguhnya; 2. Terjadinya kolusi dan/atau suap-menyuap antara legislatif dan eksekutif agar dokumen perencanaan dibuat berdasarkan kemauan pihak tertentu tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat dan umum; 3. Terjadinya gratifikasi dari penyedia kepada PPK dalam penyusunan RAB sehingga menguntungkan pihak tertentu; 4. Terjadinya suap-menyuap antara penyedia dengan PPK dalam menentukan spesifikasi dalam perencanaan barang/jasa sehingga menguntungkan pihak tertentu; 5. Kolusi, nepotisme ataupun benturan kepentingan dalam penyusunan RKA dengan merencanakan belanja yang menguntungkan pihak tertentu; 6. Pemberian gratifikasi dari TAPD kepada DPRD ataupun sebaliknya dalam proses persetujuan perencanaan dan penganggaran APBD.
2	Jarang					
1	Sangat Jarang					

2. Area Pengawasan

Skala	Kemungkinan	Dampak				
		Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Sedang	Signifikan	Sangat Signifikan
5	Sangat Sering					
4	Sering					Benturan kepentingan dalam proses perencanaan pengawasan sehingga perangkat daerah dan/atau desa yang memiliki risiko tinggi kecurangan tidak masuk dalam PKPT
3	Kadang - kadang					Pemberian gratifikasi oleh auditan kepada APIP sehingga pemeriksaan tidak berjalan sesuai pedoman yang berlaku
2	Jarang					1. Benturan kepentingan (hubungan kekeluargaan/pertemanan) antara APIP dan auditan sehingga pemeriksaan tidak berjalan sesuai pedoman yang berlaku; 2. Terjadinya suap-menyuap antara auditan dan APIP sehingga temuan kerugian negara/daerah tidak masuk dalam LHP; 3. Pemerasan oleh APIP kepada auditan untuk menghilangkan temuan kerugian negara; 4. Intervensi dari manajemen (Pemerintah Kabupaten Banyumas) agar APIP tidak mengungkap tindak pidana korupsi; 5. Kolusi antara APIP dan auditan untuk menghilangkan bukti audit; 6. Terjadinya suap-menyuap antara auditan dan APIP agar temuan kerugian negara/daerah dalam SIMHP dinyatakan selesai
1	Sangat Jarang					

3. Area Pengadaan Barang/Jasa

Skala	Kemungkinan	Dampak				
		Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Sedang	Signifikan	Sangat Signifikan
5	Sangat Sering					
4	Sering					1. Identifikasi kebutuhan barang/jasa yang ditetapkan Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak mencerminkan kebutuhan riil; 2. Kolusi antara PPK, Penyedia, dan Konsultan Pengawas untuk memanipulasi data persentase penyelesaian pekerjaan; 3. Kolusi antara PPK, Penyedia, Konsultan Pengawas dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk memanipulasi data tentang mutu hasil pekerjaan konstruksi; 4. Intervensi manajemen kepada PPK sehingga tidak melakukan pemutusan kontrak meskipun terjadi kondisi yang memenuhi syarat untuk dilakukannya pemutusan kontrak
3	Kadang - kadang					1. Benturan kepentingan antara PPK dengan penyedia sehingga spesifikasi disusun mengarah kepada suatu merek atau penyedia tertentu; 2. Suap-menyuap antara penyedia dengan PPK untuk menggelembungkan HPS sehingga nilai kontrak lebih tinggi; 3. Persekongkolan antar sesama penyedia dalam mengatur harga penawaran pada proyek yang ditender oleh Pemerintah Kabupaten untuk memenangkan salah satu penyedia tertentu; 4. Intervensi oleh manajemen (Pemerintah Kabupaten) kepada Pokja Pemilihan untuk memenangkan penyedia tertentu meskipun tidak memenuhi kualifikasi teknis dan/atau penawaran terbaik
2	Jarang					PA/KPA tidak mengumumkan RUP melalui aplikasi SIRUP untuk menghilangkan persaingan karena telah memilih penyedia sejak tahap perencanaan
1	Sangat Jarang					

4. Area Manajemen Aparatur Sipil Negara

Skala	Kemungkinan	Dampak				
		Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Sedang	Signifikan	Sangat Signifikan
5	Sangat Sering					Benturan kepentingan pada saat pengukuran kinerja pegawai sehingga pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tidak berdasarkan kinerja yang sebenarnya
4	Sering					1. Suap-menyuap dan/atau Benturan kepentingan dalam rekrutmen pegawai Non ASN sehingga SDM yang diperoleh tidak sesuai kebutuhan dan kualifikasi; 2. Kolusi, nepotisme ataupun benturan kepentingan dalam proses mutasi dan promosi pegawai sehingga proses tersebut tidak mempertimbangkan kompetensi jabatan dan pola mutasi yang ditetapkan; 3. Terjadinya gratifikasi dalam proses mutasi dan promosi pegawai sehingga proses tersebut tidak mempertimbangkan kompetensi jabatan dan pola mutasi yang ditetapkan; 4. Terjadinya gratifikasi dalam pemrosesan berkas dokumen kepegawaian dengan harapan dapat menguntungkan pegawai yang bersangkutan
3	Kadang - kadang					Kolusi dan nepotisme dalam penjatuhan hukuman disiplin sehingga hukuman yang diberikan tidak sesuai dengan sanksi yang seharusnya diberikan
2	Jarang					
1	Sangat Jarang					Suap-menyuap dalam proses mutasi dan promosi pegawai sehingga proses tersebut tidak mempertimbangkan kompetensi jabatan dan pola mutasi yang ditetapkan

5. Area Manajemen Aset Daerah

Skala	Kemungkinan	Dampak				
		Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Sedang	Signifikan	Sangat Signifikan
5	Sangat Sering					Penyalahgunaan BMD untuk kepentingan pribadi
4	Sering					1. Kecurangan dalam penyusunan RKBMD sehingga menguntungkan pihak tertentu; 2. Terjadinya suap-menyuap, gratifikasi dan/atau benturan kepentingan dalam proses pengadaan BMD sehingga barang yang diperoleh tidak sesuai kualitas yang direncanakan; 3. Kolusi dalam lelang BMD yang dihapus sehingga pemenang lelang bukan penawar tertinggi/terbaik
3	Kadang - kadang					Penggelapan BMD dengan menyatakan bahwa BMD rusak/hilang dengan tujuan agar BMD tersebut dapat dimiliki secara pribadi
2	Jarang					Terjadinya suap-menyuap dan/atau gratifikasi dalam proses pengamanan aset secara administrasi, hukum maupun fisik sehingga menguntungkan pihak tertentu
1	Sangat Jarang					Benturan kepentingan dalam penyajian aset pada LKPD sehingga data BMD tidak akurat

6. Area Penyusunan Laporan Keuangan

Skala	Kemungkinan	Dampak				
		Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Sedang	Signifikan	Sangat Signifikan
5	Sangat Sering					
4	Sering					Terjadinya benturan kepentingan sehingga pendapatan dan/atau belanja tidak dicatat pada akun, nilai dan/atau periode yang tepat sehingga menguntungkan pihak tertentu
3	Kadang - kadang					
2	Jarang					Terjadinya benturan kepentingan dalam penyusunan laporan keuangan sehingga penyajian nilai aset, kewajiban dan ekuitas tidak sesuai kondisi yang sebenarnya
1	Sangat Jarang					1. Terjadinya benturan kepentingan dalam reviu LKPD sehingga reviu laporan keuangan tidak dilakukan sesuai standar dan menguntungkan pihak tertentu; 2. Terjadinya suap menyuap yang dilakukan pejabat pemerintahan daerah demi mendapatkan predikat WTP dari BPK

7. Area Pelayanan Perizinan

Skala	Kemungkinan	Dampak				
		Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Sedang	Signifikan	Sangat Signifikan
5	Sangat Sering					
4	Sering					1. Pemberian gratifikasi dari pemohon kepada petugas perijinan sehingga proses perijinannya lebih diutamakan dan dipercepat tanpa mempertimbangkan SOP; 2. Manipulasi data Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) oleh petugas pendapatan sehingga keputusan pemberian izin tetap diterbitkan meskipun pemohon memiliki tanggungan pajak yang belum dilunasi
3	Kadang - kadang					Suap-menyuap antara pemohon dan tim teknis dalam proses verifikasi perijinan agar rekomendasi teknis diberikan meskipun tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
2	Jarang					1. Kolusi dan benturan kepentingan dalam proses penyusunan kebijakan/regulasi perijinan sehingga menguntungkan pihak tertentu; 2. Pungutan liar yang dilakukan petugas perijinan sehingga membuat proses perijinan berbiaya tinggi
1	Sangat Jarang					

8. Area Optimalisasi Pajak Daerah

Skala	Kemungkinan	Dampak				
		Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Sedang	Signifikan	Sangat Signifikan
5	Sangat Sering					
4	Sering					1. Benturan kepentingan (hubungan kekeluargaan/pertemanan) antara pegawai yang bertugas mendata dengan wajib pajak dalam penentuan basis data pajak daerah yang tidak sesuai pedoman sehingga wajib pajak tidak masuk dalam basis data; 2. Benturan kepentingan antara petugas dengan pemilik objek pajak dalam menentukan potensi pajak daerah, sehingga terdapat objek-objek yang tidak dikenai pajak; 3. Penggelapan pajak oleh wajib pajak dalam <i>self assesment system</i> dengan melaporkan data pendapatan yang tidak sesuai dengan keadaan riil atau manipulasi data sehingga kewajiban pajak wajib pajak tersebut berkurang; 4. Suap-menyuap antara petugas berwenang dengan wajib pajak terkait verifikasi penghitungan besaran pajak yang harus dibayarkan sehingga pembayaran pajak tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku; 5. Pemberian gratifikasi pada petugas pajak pada saat penagihan tunggakan pajak sehingga tunggakan pajak tidak tertagih secara maksimal; 6. Benturan kepentingan sehingga tempat usaha wajib pajak tidak dipasang alat monitoring pajak
3	Kadang - kadang					1. Pemberian gratifikasi terhadap petugas pajak yang melakukan perhitungan menggunakan <i>Official Assessment System</i>, sehingga pajak tertagih ke wajib pajak tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya; 2. Manipulasi data pendapatan pajak sehingga insentif pungutan pajak yang didapatkan menjadi lebih besar.
2	Jarang					
1	Sangat Jarang					

9. Area Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial

Skala	Kemungkinan	Dampak				
		Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Sedang	Signifikan	Sangat Signifikan
5	Sangat Sering					
4	Sering					1. Benturan kepentingan (hubungan kekeluargaan/pertemanan) antara pegawai yang bertugas mendata dengan penerima dalam penentuan basis data penerima bantuan sosial sehingga tidak tepat sasaran dan penerima yang tumpang tindih; 2. Benturan kepentingan dalam penentuan agen penyalur bantuan pangan non tunai (BPNT), sehingga terpilihnya agen penyalur yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku; 3. Gratifikasi dan/atau benturan kepentingan antara pihak dari dinas terkait dengan penyedia sehingga e-warong harus membeli sembako BPNT dari penyedia tersebut; 4. Pemberian bantuan sosial/hibah dikaitkan dengan kepentingan politik oknum tertentu sehingga elektabilitas oknum tersebut meningkat di daerah yang bersangkutan
3	Kadang - kadang					1. Terjadi kecurangan e-warong dan penyedia sehingga BPNT yang disalurkan tidak sesuai dengan kualitas yang ditetapkan sehingga menguntungkan pihak-pihak tertentu; 2. Penggelapan oleh petugas penyalur bantuan sosial dengan memotong besaran bantuan sosial sehingga jumlah bantuan sosial tidak sesuai nilai yang seharusnya; 3. Gratifikasi dan/atau benturan kepentingan antara pihak dari dinas terkait dengan pengusul proposal sehingga usulan hibah diloloskan meskipun tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2	Jarang					
1	Sangat Jarang					

10.Area Pelayanan Kesehatan

Skala	Kemungkinan	Dampak				
		Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Sedang	Signifikan	Sangat Signifikan
5	Sangat Sering					
4	Sering					1. Pemberian gratifikasi (komisi obat dan alat kesehatan) oleh penyedia obat dan alat kesehatan kepada dokter sehingga dokter menggunakan penyedia tersebut tanpa mempertimbangkan harga dan kualitas; 2. Gratifikasi oleh pasien kepada tenaga kesehatan agar mendapatkan perlakuan khusus yang tidak sesuai SOP; 3. Perbuatan curang oleh tenaga kesehatan dalam membuat dokumen tagihan untuk menagih biaya pelayanan medis yang tidak dilakukan/ tidak dibutuhkan; 4. Pemanfaatan jabatan oleh tenaga kesehatan yang memiliki Fasyankes, yaitu memindahkan pasien Fasyankes Pemerintah tempatnya bekerja ke Fasyankes pribadinya
3	Kadang - kadang					1. Penggelapan obat dan/atau alat kesehatan tenaga kesehatan untuk digunakan dalam praktek pribadi; 2. Kolusi antara pengurus barang dengan tenaga kesehatan untuk memanipulasi data persediaan obat-obatan; 3. Manipulasi data kesehatan pada saat pengusulan anggaran dan/atau pelaporan kinerja
2	Jarang					
1	Sangat Jarang					

11.Area Pelayanan Pendidikan

Skala	Kemungkinan	Dampak				
		Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Sedang	Signifikan	Sangat Signifikan
5	Sangat Sering					
4	Sering					1. Pemberian gratifikasi oleh calon peserta didik kepada manajemen pendidikan untuk memperoleh kuota tempat duduk dalam proses penerimaan peserta didik baru 2. Benturan kepentingan antara pejabat dengan calon peserta didik agar calon peserta didik dapat diterima di satuan pendidikan tertentu; 3. Intervensi dari pihak-pihak tertentu dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB); 4. Adanya pungutan liar oleh manajemen pendidikan dengan modus sumbangan Pendidikan; 5. Gratifikasi dari penyedia sarana dan prasarana pendidikan kepada manajemen pendidikan untuk dapat ditunjuk sebagai penyedia; 6. Terjadinya kecurangan dalam penyajian data terkait dengan tunjangan profesi guru; 7. Kolusi, nepotisme dan benturan kepentingan dalam pemenuhan tenaga pendidikan Non-PNS dengan menyusun syarat kompetensi yang menguntungkan saudara/teman/kolega
3	Kadang - kadang					
2	Jarang					
1	Sangat Jarang					